



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 Juni 2016.
Pukul	: 10.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, BSc./Kasubag. Rapat Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan RKP dan RKA-KL TA 2017.
Hadir	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.20 oleh Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Berdasarkan Perpres No. 45 Tahun 2016 dan Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016, Kemendikbud RI menyampaikan usul pagu indikatif RAPBN TA 2017 sebesar **Rp38.583.603.000.000,- (tiga puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga juta rupiah)** atau mengalami penurunan sebesar **27,43%** atau sebesar **Rp14.586.508.874.000,- (empat belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** bila dibandingkan dengan pagu indikatif RAPBN TA 2016 (Rp53.170.111.874.000,-)

2. Terhadap usul pagu indikatif RAPBN TA 2017 yang mengalami penurunan sebesar Rp14.586,5 M (27,43%) dibandingkan dengan pagu indikatif RAPBN TA 2016 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Kemendikbud RI menyampaikan usul tambahan anggaran untuk membiayai kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Penyediaan sarana dan media pembelajaran;
 - b. Penyempurnaan kurikulum, sistem perbukuan, sistem pembelajaran, dan penilaian pendidikan;
 - c. Peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi;
 - d. Implementasi dan pelatihan Kurikulum 2013;
 - e. Pengelolaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan SEAMEO Pusat Pendidikan Dini Anak dan Keluarga (*Centre Early Child Education and Parenting*);
 - f. Pemenuhan tunjangan profesi guru;
 - g. Fasilitasi sertifikasi guru;
 - h. Pengembangan dan pembinaan Bahasa dan Sastra;
 - i. Peningkatan pengelolaan permuseuman; dan
 - j. Pemenuhan kebutuhan gaji dan penyewaan gedung Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

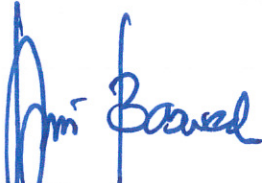
3. Terhadap RKP, Pagu Indikatif, dan usul tambahan anggaran pada RAPBN TA 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Komisi X DPR RI memberikan pandangan sbb:
 - a. Belum menyetujui pagu indikatif maupun alokasi anggaran di masing-masing unit utama dan program, karena memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Mendikbud RI meyakinkan Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, bahwa Kemendikbud RI memerlukan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2017.
 - b. Meminta Kemendikbud RI untuk melakukan *exercise* kembali RAPBN TA 2017 dengan pagu sebesar Rp38,5 T maupun dengan pagu Rp49,23 T (APBN TA 2016).
 - c. Terhadap usul tambahan anggaran, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menghitung besaran pagu dan menyampaikan rasionalitasnya yang disampaikan kepada Komisi X DPR RI sebelum tanggal 29 Juni 2016.
 - d. Mendesak Kemendikbud RI untuk menghitung kembali secara rasional belanja mengikat dan belanja prioritas nasional untuk membiayai pelaku pendidikan yang berbudaya, peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelaku kebudayaan yang berbudaya, penguatan tata kelola dan pelibatan publik, dengan catatan anggaran yang berkaitan langsung dengan peserta didik dan guru sekurang-kurangnya sama dengan TA 2016.
 - e. Beberapa program/kegiatan yang perlu dikuatkan antara lain: pendidikan Pancasila, karakter bangsa, pengembangan kurikulum, kompetensi guru-kepala sekolah-pengawas, kualitas pendidikan di daerah 3T, literasi, budaya sekolah, perlindungan, pemanfaatan cagar budaya, serta pengembangan sumber daya perfilman.

- f. Meminta Kemendikbud RI agar membuat perbandingan (komparasi) program dan/atau kegiatan, anggaran-kinerja tahun 2015 dan tahun 2016, RPJP dan RPJM, serta target kinerja di masing-masing program sebagai referensi pembuatan RKP dan RKA-K/L TA 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan mengadakan Raker kembali antara tgl. 20 s/d 21 Juli 2016 dengan agenda pendalaman penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), serta penetapan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.35 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI,**



ANIES BAWESDAN

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M